RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
DAFTAR TABEL			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud Dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**		
	2.1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
	2.2.	Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sintang	17
	2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang	21
	2.4.	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	35
BAB III	**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**		
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	54
	3.2.	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60
	3.3.	Telaahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang	62
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV	**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**		
	4.1.	Visi Dan Misi Dinas Sosial Sintang	66
	4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sintang	70
	4.3.	Strategi Dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sintang	74
BAB V	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**		79
BAB VI	**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**		**96**
BAB VII	**PENUTUP**		**98**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang	8
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	18
Tabel 2.5	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sintang	20
Tabel 2.6	Jenis Peluang Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang	23
Tabel 2.7	Data Jumlah PMKS di Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 yang menjadi Urusan Sosial Kabupaten Sintang	25
Tabel 2.8	Banyaknya Orang Terlantar di Kabupaten Sintang Tahun 2015	26
Tabel 2.9	Banyaknya Keluarga Berumah Tak Layak Huni di Kabupaten Sintang Tahun 2015	27
Tabel 2.10	Banyaknya Penyandang Disabilitas (Fisik) di Kabupaten Sintang Tahun 2015	28
Tabel 2.11	Banyaknya Penyandang Disabilitas (Mental) di Kabupaten Tahun 2015	29
Tabel 2.12	Banyaknya Wanita Tuna Susila di Kabupaten Sintang Tahun 2015	29
Tabel 2.13	Banyaknya Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Sintang Tahun 2015	30
Tabel 2.14	Jumlah Orang dengan HIV / AIDS di Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015	30
Tabel 2.15	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015	31
Tabel 2.16	Banyaknya Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sintang Tahun 2015	31
Tabel 2.17	Banyaknya Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Sintang Tahun 2015	32
Tabel 2.18	Banyaknya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sintang Tahun 2015	33
Tabel 2.19	Banyaknya Fakir Miskin/Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2015	33
Tabel 2.20	Banyaknya Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Sakit Jiwa) di Kabupaten Sintang Tahun 2015	34

Tabel 2.21	Banyaknya Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Sintang Tahun 2015	35
Tabel 2.22	Rekapitulasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sintang Tahun 2015	37
Tabel 2.23	Pembinaan PMKS dan PSKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2015	38
Tabel 2.24	Data Hasil Verivikasi dan Validasi Fakir Miskin Tahun 2015	43
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	61
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	63
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	64
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	76
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021	80
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tahun 2021 merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu tahun 2016-2021. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2016-2021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Sosial Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut :

(1) RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Sintang

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran implementasi dari Renstra Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang

sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

(4) Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan Renstra Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dan

sekaligus untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.

b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sintang selama Periode 2017-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Dinas Sosial Kabupaten Sintang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Sosial Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, sesuai dengan kebijakan Bupati, sedangkan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, .
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Sosial .
3. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Sosial .
4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Sosial .
5. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas fungsi.
6. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Sosial
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang

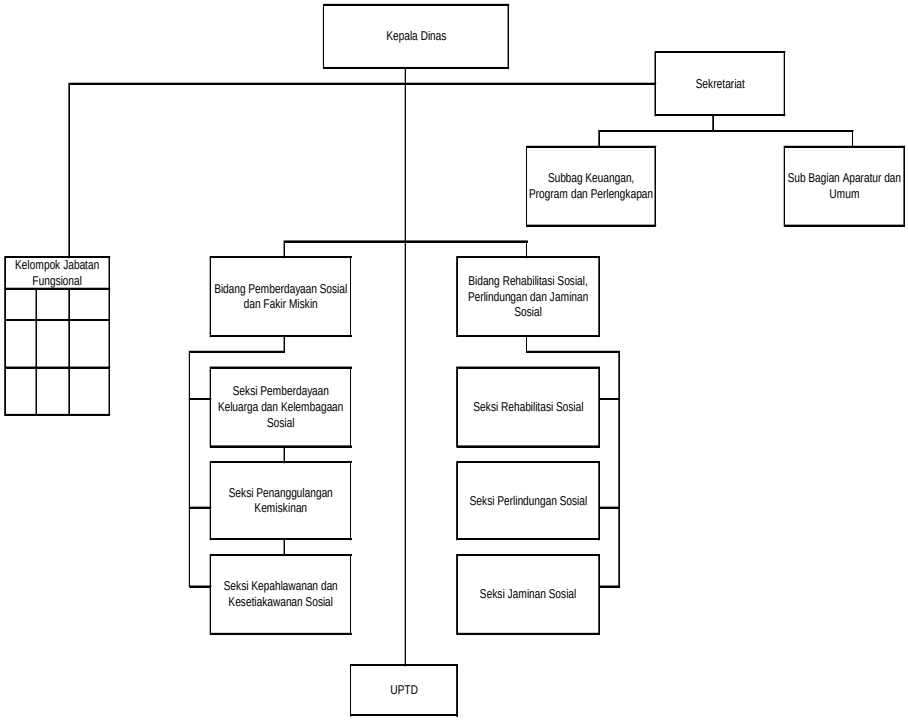

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tersebut tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 7 peraturan ini, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. Pemimpin dan pengorganisasian tugas Bidang Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

b. Penyusunan program kerja Dinas Sosial.

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Sosial.

d. Pembinaan UPTD di bidang sosial .

e. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Sosial.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

g. Penyampaian rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial.

h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial.

i. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

j. Pelaksanaan pengendalian internal.

k. Penyusunan analisa jabatan.

l. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang sosial.

m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.

n. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Sosial dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 2 Kepala Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan uraian Tugas sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Sosial, .

b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan asset.

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Sosial,

d. Pengumpulan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

e. Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariat.

f. Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Sosial .

g. Penelahaan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.

h. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.

i. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Sosial .

j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak, dan

k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan :

a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai.

c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pendukung Kegiatan pada Dinas Sosial

e. Mengkoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Melaksanakan iventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.

g. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial .

h. Melaksanakan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas.

i. Mengelola/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

j. Melaksanaan inventarisasi asset dan perlengkapan Dinas Sosial.

k. Pelaksanaan penatausahaan asset Dinas

l. Menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).

m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas.

n. Melaksanakan inventaris dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persdiaan barang akhir tahun.

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Aparatur dan Umum

a. Menyusun Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.

b. Melakukan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas).

c. Menyusun bahan dan laporan yang diperlukan pada Sekretaris Dinas.

d. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilain Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Melaksanakan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai.

f. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Dinas.

g. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi.

h. Melaksanakan iventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, potensi sumber daya sosial masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil dan pekerja sosial,kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan pemberdayaan fakir miskin serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Penanggulangan Kemiskinan.
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
e. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).
f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan Komunitas Adat Terpencil.
h. Perumusan kebijakan daerah tentang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten.
i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tentang pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
j. Peaksanaan monitoring dan evaluasi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
k. Pengordinasian dan fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten Sintang.
l. Pelaksnaan koordinasi dan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Sintang.
m. Perumusan kebijakan di bidang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan peduli keluarga.
n. Pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Sintang.
o. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
p. Pengkoordinasian pemberian bantuan stimulant dan penataan lingkungan.
q. Pengumpulan bahan persiapan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin.

r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin.

s. Pengkoordinasian pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin.

t. Pengkoordinasian pembedayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

u. Pengkoordinasian bantuan korban bencana dan pemberdayaan keluarga, pengembangan sumber dana jaminan advokasi sosial dan pengembangan organisasi serta penyuluhan pembinaan partisipasi dan kesetiakawanan sosial.

v. Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pencegahan bagi korban bencana sosial.

w. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

x. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten.

y. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

z. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan.

aa. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang undangan.

bb. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

cc. Pelaksnaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

dd. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

A. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.

Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Seksi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas mengumpuldan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial, Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Perlindungan Sosial Korban Bencana, Bimbingan Sosial dan Jaminan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
d. Pengkoordinasian pemulangan warga Negara migrant tindak kekerasan dari titik debarkasi.
e. Pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif dan orang dengan Human Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial, Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti.

f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif dan orang dengan Human Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti.

g. Perumusan dan penyusunan program, petunjuk teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia terlantar, penyandang tuna sosial serta penyandang cacat.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

i. Pengkoordinasian pemeliharaan anak-anak terlantar.

j. Pelaksanaan analisis data sasaran dan penilaian kelayakan penerima jaminan sosial.

k. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial.

l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Sosial.

m. Pemantauan, evaluasi dan pelporan pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial.

n. Pengkoordinasian pelaksnaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.

o. Pengkoordinasian penangulangan bencana.

p. Pelaksanaan tanggap darurat terhadap korban bencana.

q. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dn fungsi di bidang Rehabiitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

r. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

s. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

t. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial.

u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Perlindungan Sosial

Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Jaminan Sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Sosial, Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	5
	Jumlah	**27**

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	7
3	SLTA	12
4	SLTP	2
5	SD	-
	Jumlah	**27**

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
7	Penata Muda (III/a)	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda (II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	4
12	Juru (I/c)	-
	Jumlah	**27**

2.2.2 Anggaran

Kerangka pendanaan Dinas Sosial terkait langsung dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan

pembangunan lima tahun yang akan datang. Adapun sumber dana di dukung APBD Kabupaten Sintang.

Adapun pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 melalui Dana Alokasi Umum sebesar :

Belanja Langsung	:	Rp. 2.273.544.720,00
Belanja Tidak Langsung	:	Rp. 3.211.271.403,00

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Sintang meliputi :

- Tanah dan Gedung Kantor yang terletak di Jl. MT. Haryono Km.03 Sintang
- Ruang Rapat.

2. Kendaraan Dinas;

Jumlah kendaraan dinas sampai dengan 28 Februari 2017 adalah sebanyak 10 unit yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda 4 yang merupakan inventaris Pemerintah Kabupaten Sintang dan 8 (delapan) unit kendaraan roda yang merupakan Inventaris Pemerintah Kabupaten Sintang.

3. Peralatan Kantor;

Kekayaan Dinas Sosial, Kabupaten Sintang berupa peralatan kantor seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagaimana tercantum dalam buku barang inventaris yang berada di bawah tanggungjawab Sekretariat.

4. Aset Jalan, Irigasi dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya;

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial

Kabupaten Sintang

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1 Buah	
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua) - Kendaraan Motor Air	 2 Unit 8 Unit - Unit	
3	Komputer Laptop	2 Buah	
4	Komputer (Personal Computer)	9 Buah	
5	Proyektor Slide	1 Buah	
6	AC	8 Buah	
7	Pemotong Kertas	1 Buah	
8	Printer	8 Buah	
9	Pesawat Telepon	1 Buah	
10	Kursi Besi Panjang	1 Buah	
11	Lemari Kayu	3 Buah	
12	Faximile	1 Buah	
13	Brankas	1 Buah	
14	Filling Cabinet	4 Buah	
15	Lemari Arsip	3 Buah	
16	Kursi Tamu	2 Set	
17	Papan Pengumuman	1 Buah	
18	Meja Kerja/Direksi	9 Buah	
19	Kursi Kerja	22 Buah	
20	Meja Kerja Pejabat	1 Buah	
21	Kursi Putar	2 Buah	
22	Meja Setengah Biro	10 Buah	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
23	Kipas Angin Gantung	2 Buah	
24	Kipas Angin Duduk	3 Buah	
25	Tong Air	1 Buah	
26	Pipa Rel Tirai	1 Buah	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Dinas Sosial/Urusan Sosial yang sebelumnya masih tergabung pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sintang, yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011-2015. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administasi Perkantoran

Fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Pelayanan Administasi Perkantoran sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat yang rendah.

Sebagai suatu organisasi, Dinas Sosial Kabupaten Sintang mutlak memiliki fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran yang baik, rapi dan jelas. Sebab dengan demikian, maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang selaku institusi akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran di Dinas Sosial Kabupaten Sintang selama tahun 2017-

2021, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai institusi pelaksana di bidang sosial.

Beberapa langkah-langkah konkrit pelaksanaan fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran di Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna menunjang kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, ketepatan dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif..
b. Mengembangkan sistem kearsipan kantor yang jelas, akurat dan transparan sehingga dapat menunjang kegiatan perencanaan, koordinasi, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.
c. Mengembangkan dan menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) antar bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sehingga terwujud kekompakan dan produktifitas kerja.
d. Menerapkan sistem manajemen ketatausahaan modern.
e. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga terwujud pengembangan sistem perkantoran elektronik yang mengacu konsep *e-government* di Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

2. Pelayanan Bidang Sosial

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mengupayakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan sosial akan meningkat lebih baik. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan fakir miskin, orang terlantar, masyarakat terasing, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan panti asuhan. Jenis masalah sosial tersebut digolongkan dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dari 26 jenis PMKS yang ditetapkan Kementerian Sosial RI, terdapat 20 jenis yang merupakan urusan Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Dalam rangka penanganan PMKS tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sintang dibantu oleh sejumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), akan tetapi agar berperan aktif PSKS dalam pelaksanaanya harus selalu dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Berikut dijabarkan data dan pembinaan PMKS dan PSKS di Kabupaten Sintang tahun 2015.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat, yang karena sesuatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Adapun penduduk yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Jenis PMKS Menurut Kementerian Sosial RI dan Penanggung Jawabnya

No.	Jenis PMKS	Penanggung Jawab	
		Dinsos Kab. Sintang	Instansi Terkait
1.	Anak Balita Terlantar	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas KBP3A
2.	Anak Terlantar	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas KBP3A
3.	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas KBP3A
4.	Anak Jalanan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas KBP3A
5.	Anak dengan Kedisabilitasan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
6.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas KBP3A
8.	Lanjut Usia Terlantar	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial & Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
9.	Penyandang Disabilitas	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	

No.	Jenis PMKS	Penanggung Jawab	
		Dinsos Kab. Sintang	Instansi Terkait
10.	Tuna Susila	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
11.	Gelandangan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
12.	Pengemis	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
13.	Pemulung	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
14.	Kelompok Minoritas	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
16.	Orang dengan HIV / AIDS	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Kesehatan
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Kesehatan
18.	Korban Tindak Kekerasan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
21.	Korban Bencana Alam	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
22.	Korban Bencana Sosial	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
24.	Fakir Miskin	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Pskologis	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
26.	Komunitas Adat Terpencil	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	

Tabel 2.7

Data Jumlah PMKS di Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 yang menjadi Urusan Sosial Kabupaten Sintang

No.	Jenis PMKS	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Penyandang Disabilitas (Fisik)	Orang	50	315	321	524	558
2	Penyandang Disabilitas (Mental)	Orang	65	62	60	154	154
3	Penyandang Disabilitas (Ganda)	Orang	-	-	-	-	-
4	Orang Terlantar	Orang	36	65	67	10	25
5	Wanita Tuna Susila	Orang	97	97	97	92	92
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Orang	107	120	57	121	97
7	Orang dengan HIV / AIDS	Orang	38	39	39	250	351
8	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	16	20	26	26	18
9	Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Orang	10	31	31	45	8
10	Fakir Miskin	KK	26.118	25.179	25.179	96.514	97.758
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Sakit Jiwa)	KK	65	62	60	154	361
12	Waria	Orang	-	-	-	24	24
13	Pemulung	Orang	-	-	-	168	-
14	Anak Nakal	Orang	-	-	-	8	8
15	Lansia Terlantar	Orang	-	-	-	2	10
16	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Orang	-	-	-	8	8
17	Korban Bencana Alam dan Sosial	KK	1.822	2.042	2.514	3.590	113
18	Komunitas Adat Terpencil	KK	7210	6.164	6.164	6.164	3.477
19	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	KK	4.923	4.923	4.923	4.923	3.990
20	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	7.020	1.358	1.358	1.355	1.302
J U M L A H		**PMKS**	**47.577**	**40.477**	**40.896**	**114.132**	**108.354**

Berdasarkan Kabupaten Sintang Dalam Angka 2015, jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 390.796 orang, 51,54 % berjenis kelamin Laki-laki dan 48,46 % Perempuan. Kemudian jenis PMKS yang mendominasi adalah fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni dan Komunitas Adat Terpencil.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang pada Tahun 2015 adalah 97.758 KK, terjadi peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2014 yang berjumlah 96.514 KK. Peningkatan ini sebagai akibat dari pendataan fakir miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dilakukan verivikasi penerima JKN tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang kepada sejumlah penduduk di Kabupaten Sintang.

Keluarga Berumah Tak Layak Huni dan Komunitas Adat Terpencil dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 43,6% untuk KAT 19% untuk Keluarga Berumah Tak layak Huni. Mengingat 2 Jeni PMKS ini termasuk PMKS tertinggi maka perlu mendapat perhatian khusus, yaitu alokasi dana untuk kedua jenis PMKS tersebut.

Berikut akan dijabarkan data setiap jenis PMKS berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2015.

Tabel 2.8

Banyaknya Orang Terlantar di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No	Kecamatan	Orang Terlantar				
		Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
1	Serawai	-	-	5	1	3
2	Ambalau	-	-	2	0	0
3	Kayan Hulu	-	-	1	5	1
4	Sepauk	-	-	4	4	4
5	Tempunak	-	-	2	2	0
6	Sei. Tebelian	-	-	1	4	4
7	Sintang	25	10	30	20	14
8	Dedai	-	-	5	6	1
9	Kayan Hilir	-	-	5	2	1
10	Kelam Permai	-	-	4	3	1
11	Binjai Hulu	-	-	1	8	5
12	Ketungau Hilir	-	-	3	1	0
13	Ketungau Tengah	-	-	2	6	0
14	Ketungau Hulu	-	-	2	3	2
	Jumlah	**25**	**10**	**67**	**65**	**36**

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.9

Banyaknya Keluarga Berumah Tak Layak Huni di Kabupaten Sintang
Tahun 2015

No	Kecamatan	Rumah Tidak Layak Huni	
		Tahun 2015	Tahun 2014
1	Serawai	237	303
2	Ambalau	281	347
3	Kayan Hulu	402	468
4	Sepauk	215	281
5	Tempunak	149	215
6	Sei Tebelian	140	206
7	Sintang	437	503
8	Dedai	226	292
9	Kayan Hilir	564	630
10	Kelam Permai	239	305
11	Binjai Hulu	142	208
12	Ketungau Hilir	240	306
13	Ketungau Tengah	391	457
14	Ketungau Hulu	327	402
Jumlah 2015		3.990	4.923)*
2013)*		4.923	
2012		4.923	
2011		4.213	

Sumber: Seksi Pemberdayaan Bantuan Sosial

(Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

*) Diambil dari data tahun 2012, karena data tahun 2013 dan 2014 belum tersedia dan dianggap sama dengan tahun 2012

Tabel 2.10

Banyaknya Penyandang Disabilitas (Fisik) di Kabupaten Sintang

Tahun 2015

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas (Fisik)				
		2015	2014	2013	2012	2011
1	Serawai	59	56	56	56	-
2	Ambalau	137	137	124	124	-
3	Kayan Hulu	27	27	5	5	14
4	Sepauk	23	7	-	-	-
5	Tempunak	44	44	11	1	-
6	Sei Tebelian	2	2	2	2	5
7	Sintang	20	20	17	13	7
8	Dedai	51	38	37	37	-
9	Kayan Hilir	24	22	1	1	20
10	Kelam Permai	3	3	2	2	-
11	Binjai Hulu	133	133	42	40	-
12	Ketungau Hilir	34	34	34	34	-
13	Ketungau Tengah	1	1	-	-	4
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-
Jumlah		558	524	320	315	50

Sumber : Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.11

Banyaknya Penyandang Disabilitas (Mental) di Kabupaten

Tahun 2015

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas (mental)				
		2015	2014	2013	2012	2011
1	Serawai	5	5	2	2	3
2	Ambalau	5	5	-	2	-
3	Kayan Hulu	11	11	11	11	4
4	Sepauk	16	16	9	5	6
5	Tempunak	6	6	2	3	2
6	Sei Tebelian	6	6	2	2	5
7	sintang	40	40	21	21	15
8	Dedai	15	15	-	-	4
9	Kayan Hilir	12	12	3	3	4
10	Kelam Permmai	12	12	5	4	6
11	Binjai Hulu	4	4	-	1	3
12	Ketungau Hilir	2	2	2	1	2
13	Ketungau Tengah	9	9	3	2	8
14	Ketungau Hulu	11	11	-	15	3
Jumlah		154	154	60	62	65

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.12

Banyaknya Wanita Tuna Susila di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No	Tahun	Wanita Tuna Susila(orang)
1	2015	92
2	2014	92
3	2013	97
4	2012	97
5	2012	97
6	2011	97

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.13

Banyaknya Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Sintang

Tahun 2015

No.	Kecamatan	Eks Narapidana				
		Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
1	Serawai	3	10	1	2	0
2	Ambalau	3	7	0	3	1
3	Kayan Hulu	3	0	0	0	1
4	Sepauk	4	4	3	5	3
5	Tempunak	5	8	3	1	0
6	Sei Tebelian	15	12	8	9	7
7	Sintang	50	54	26	75	81
8	Dedai	4	2	1	5	8
9	Kayan Hilir	2	8	6	5	0
10	Kelam Permai	1	2	2	4	1
11	Binjai Hulu	1	5	1	-	1
12	Ketungau Hilir	4	6	4	9	1
13	Ketungau Tengah	1	3	1	1	1
14	Ketungau Hulu	1	0	1	1	2
Jumlah		97	121	57	120	107

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.14

Jumlah Orang dengan HIV / AIDS di Kabupaten Sintang

Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penderita HIV (+) (Orang)	Jumlah Penderita AIDS (Orang)	Total (Orang)
2015	167	184	351
2014	133	117	250
2013	20	19	39
2012	20	19	39
2011	15	23	38

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.15

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sintang

Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Orang)
2015	8
2014	45
2013	31
2012	31
2011	10

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.16

Banyaknya Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Korban Narkotika (Orang)				
		Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011
1	Serawai	1	3	3	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	-	-	-
5	Tempunak	-	-	-	-	-
6	Sei Tebelian	-	3	3	-	1
7	Sintang	17	20	20	19	15
8	Dedai	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	-	1	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	-	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-
	Jumlah	**18**	**26**	**26**	**20**	**16**

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.17

Banyaknya Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Sintang

Tahun 2015

No.	Kecamatan	Korban Bencana (KK)									
		Alam					Sosial				
		2015	2014	2013	2012	2011	2015	2014	2013	2012	2011
1	Serawai	-	-	938	200	200	-	1	-	-	-
2	Ambalau	-	-	-	300	300	-		-	-	-
3	Kayan Hulu	-	750	375	250	250	-	1	-	-	-
4	Sepauk	-	-	375	219	219	4		58	-	-
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6	Sei Tebelian	-	-	-	14	14	82		-	-	1
7	Sintang	-	-	-	130	130	22	30		226	2
8	Dedai	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	2.801	393	221	221	5		-	-	1
10	Kelam Permai	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-		-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	375	120	120	-		-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	160	160	-		-	-	1
14	Ketungau Hulu	-	-	-	200	200	-	4	-	-	-
	Jumlah	**-**	**3.551**	**2.456**	**1.816**	**1.816**	**113**	**39**	**58**	**226**	**6**

Tahun	Jumlah Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan
2015	**113**	**88**
2014	**3.590**	**102**
2013	**2.514**	**1108**
2012	**2.042**	**776**
2011	**1.822**	**368**

Sumber : Seksi Urusan Korban Bencana

(Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.18

Banyaknya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sintang

Tahun 2015

No.	Kecamatan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	
		2015	**2014**
1	Serawai	130	132
2	Ambalau	280	286
3	Kayan Hulu	105	106
4	Sepauk	55	58
5	Tempunak	57	60
6	Sei Tebelian	105	106
7	Sintang	31	35
8	Dedai	61	65
9	Kayan Hilir	37	39
10	Kelam Permai	42	46
11	Binjai Hulu	41	45
12	Ketungau Hilir	190	198
13	Ketungau Tengah	48	50
14	Ketungau Hulu	120	129
	Jumlah	**1.302**	**1.355**
	2013	**1.358**	
	2012	**1.358**	
	2011	**7.020**	

Sumber : Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.19

Banyaknya Fakir Miskin/Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Fakir Miskin		
		2015	**2014**	**2013**
1	Serawai	15.365	15.213	3.406
2	Ambalau	10.153	9.917	2.073
3	Kayan Hulu	94	-	1.998
4	Sepauk	13.611	13.426	2.461
5	Tempunak	85	-	1.117
6	Sei Tebelian	3.834	3.814	798
7	Sintang	4.036	3.925	663
8	Dedai	12.213	12.11	1.263
9	Kayan Hilir	173	-	2.455
10	Kelam Permai	10.032	10.032	1.453
11	Binjai Hulu	4.126	4.126	823
12	Ketungau Hilir	8.875	8.845	1.761

No.	Kecamatan	Fakir Miskin		
		2015	2014	2013
13	Ketungau Tengah	15.139	15.106	3.029
14	Ketungau Hulu	22	-	1.879
Jumlah		**97.758**	**96.514**	**25.179**
2012		**25.179**		
2011		**26.118**		
2010		**5.577**		
2009		**4.98**		

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.20

Banyaknya Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Sakit Jiwa) di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	
		2015	**2014**
1	Serawai	8	5
2	Ambalau	10	5
3	Kayan Hulu	108	11
4	Sepauk	26	16
5	Tempunak	12	6
6	Sei Tebelian	13	6
7	Sintang	69	40
8	Dedai	26	15
9	Kayan Hilir	27	12
10	Kelam Permai	15	12
11	Binjai Hulu	7	4
12	Ketungau Hilir	6	2
13	Ketungau Tengah	12	9
14	Ketungau Hulu	22	11
	Jumlah	**361**	**154**
	2013		**60**
	2012		**62**
	2011		**65**

Sumber : Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

Tabel 2.21

Banyaknya Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Sintang

Tahun 2015

No.	Kecamatan	KAT	
		2015	2014
1	Serawai	300	650
2	Ambalau	420	760
3	Kayan Hulu	397	397
4	Sepauk	210	280
5	Tempunak	150	340
6	Sei Tebelian	105	235
7	Sintang	-	265
8	Dedai	145	150
9	Kayan Hilir	200	300
10	Kelam Permai	210	460
11	Binjai Hulu	215	280
12	Ketungau Hilir	500	989
13	Ketungau Tengah	450	883
14	Ketungau Hulu	175	175
	Jumlah	**3.477**	**6.164)***
	2013		**6.164)***
	2012		**6.164**
	2011		**7.210**

Sumber: Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial

(Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

*) Diambil dari data tahun 2012, karena data tahun 2014 dan 2013 belum tersedia dan dianggap jumlah data masih sama

2.4 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah semua hal yang berharga dan berasal atau yang bersifat manusiawi, sosial dan ekonomi yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung menyangkut usaha kesejahteraan sosial, antara lain:

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Panti Sosial
13. Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan

Di Indonesia telah banyak berkembang potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti disebutkan diatas. Oleh karena itu keberadaanya harus dimonitor dan dibina agar fungsinya untuk turut menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing.

Sebagai contoh Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan kepada para remaja, terutama yang putus sekolah dan menganggur. Jika tidak diberi tambahan pendidikan berupa berbagai ketrampilan, mereka dapat menimbulkan banyak masalah. Kenakalan remaja sampai kriminalitas bisa dan mudah berkembang pada remaja yang menganggur. Melalui pendidikan Karang Taruna diharapkan para remaja memperoleh penyaluran. Berbagai keterampilan dipelajari dalam organisasi ini sehingga mereka menjadi aktif dan produktif, akhirnya mereka dapat hidup secara mandiri. Kemudian masih banyak lagi manfaat dari PSKS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya, Dinas Sosial Kabupaten Sintang melaporkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.22

Rekapitulasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Jenis PSKS	Jenis Kelamin		Total
		L	**P**	
1	Pekerja Sosial Profesional	4	3	7
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	85	17	102
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	2	32
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	-	12
5	Karang Taruna	-	-	34
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	1
7	Keluarga Pioner	-	-	11
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-	170
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	-	41	41
10	Penyuluh Sosial	1	2	3
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12	2	14
12	Panti Sosial	-	-	7
13	Pendamping & Operator Program Keluarga Harapan	14	9	23
14	Dunia usaha	-	-	157

Sumber : Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial/Dinsosnakertrans thn 2015)

2.1.3 PEMBINAAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dari pendataan yang diperoleh dan telah diberikan bantuan /pembinaan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.23

Pembinaan PMKS dan PSKS oleh Dinas Sosial

Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Pembinaan PMKS & PSKS	Jumlah PMKS / PSKS yang telah dibina/diberikan bantuan	
1	KUBE Fakir Miskin (bantuan)	40	KK
2	KUBE Fakir Miskin (sosialisasi)	700	Orang
3	KAT (pemetaan)	50	KK
4	Fakir Misikin penerima PKH	3.456	KK
5	Penyandang Disabilitas Fisik (pembinaan)	124	Orang
6	Penyandang Disabilitas Mental (penanganan)	47	Orang
7	Orang Terlantar	10	Orang
8	Korban Bencana Alam	0	KK
9	Korban Bencana Sosial (Kebakaran)	88	KK
10	Pembinaan Tagana	32	Orang
11	Pendamping PKH (pembinaan)	23	Orang
12	TKSM (pembinaan)	30	Orang
13	Panti Sosial	7	Panti
14	Fakir Miskin (Pendataan)	97.758	KK

Adapun Program dan Kegiatan dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial Tahun 2015 adalah :

1. **Penanganan Gangguan Jiwa Terlantar**

   Salah satu jenis PMKS adalah Penyandang Gangguan Jiwa Terlantar, yang merupakan masalah yang kompleks, karena selama ini berbagai upaya

telah dilakukan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial oleh Pemerintah dan unsur masyarakat, namun upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan.

Dalam upaya penanganan ganguan jiwa, Pemerintah membangun Rumah Sakit Jiwa yang saat ini hampir seluruh Provinsi telah memiliki RSJ. Akan tetapi kecenderungan peningkatan penderita gangguan jiwa menunjukkan bahwa penanganan tdak cukup dengan pembangunan RSJ tetapi masih ada faktor yang mempengaruhi.oleh karena itu program/kegiatan penanganan jiwa harus selalu digalakkan, salah satu melalui penaganan gangguan jiwa terlantar. Penanganan gangguan jiwa terlantar TA 2015, yaitu sebanyak ***15 orang***.

2. Razia Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Anak Punk, Orang Terlantar dan Gangguan Psikotik Terlantar

Dalam rangka penanganan PMKS khususnya gelandangan, pengemis, anak jalan, anak punk, orang terlantar dan gangguan psikotik terlantar maka Dinas Sosial Kabupaten Sintang melaksanakan Razia terhadap beberapa jenis PMKS tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan karena semakin maraknya aktivitas PMKS tersebut yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Dalam razia tersebut terjaring , dikumpulkan di Loka Bina Karya / Rumah Singgah dan dilakukan pembinaan metal spiritual, selanjutnya dikembalikan kepada orang tua / alamat masing-masing dimana terlebih dahulu menandatangani surat penyataan tidak mengulangi perbuatan.

Adapun hasil kegiatan razia sebagai berikut :

a. Anak jalanan / anak punk di Sintang sebanyak 30 orang terjaring 10 orang

b. Penyandang gangguan jiwa terlantar terjaring 10 orang

3. Penanganan Bagi Penghuni Rumah Singgah

Penanganan bagi penghuni rumah singgah adalah hasil razia yang terzaring dan pemulangan eks psikotik serta pelayanan lansia. Maksud kegiatan ini adalah penanganan sementara PMKS sambil menunggu dilakukan pemulangan kepada keluarga / alamat masing-masing. Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a. Penyandang gangguan jiwa terlantar 6 orang
b. Penyandang gangguan terlantar 6 orang
c. Pemulangan Penerima Manfaat (penyandang cacat) 4 orang
d. Pemulangan eks psikotik dari RSJ Singkawang pada bulan Mei 2015 24 orang
e. Pemulangan eks psikotik dari RSJ Singkawang pada bulan Juli 2015 33 orang
f. Razia anak jalanan/punk berjumlah 16 orang
g. Gangguan jiwa terlantar 10 orang
h. Pengemis 2 orang

4. Pembinaan Penyandang Eks Ganguan Psikotik

Dalam upaya menangani masalah kesehatan jiwa hampir seluruh Provinsi telah dibangun Rumah Sakit Jiwa, namun kecenderungan meningkatnya para penderita sakit jiwa terus meningkat. Ini menunjukkan tuntasnya penanganan kesehatan jiwa tidak hanya ditandai dengan banyaknya rumah sakit jiwa tetapi masih ada faktor lain yang turut serta mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pembinaan yang dilakukan secara berencana dan berkesinambungan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada pihak keluarga. Dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan tentang kesehatan jiwa sehingga terbentuk perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat diharapkan proaktif.

Maksud dilaksanakan kegiatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial TA 2015 adalah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi penyakit sosial pada klien yang mengalami penyakit sosial, melalui program penanganan gangguan kesehatan mental/psikotik, pengobatan serta pengembangan potensi diri yang berkesinambungan agar pulihnya fungsi sosial di masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial TA 2015 antara lain :

a. Penjemputan Eks Penyandang Penyakit Sosial / Eks Psikotik / Eks Penyandang Disabilitas Mental yang sudah dinyatakan sembuh dari pihak Rumah Sakit Jiwa Budok Singkawang sebanyak ***20 orang Eks Psikotik***.

b. Pengiriman Penyandang Penyakit Sosial / Psikotik / Penyandang Disabilitas Mental terlantar ke Rumah Sakit Jiwa Budok Singkawang untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Saat ini di RSJ tersebut terdapat ***89 orang Penyandang Gangguan Psikotik*** asal Kabupaten Sintang

c. Memfasilitasi pelayanan administrasi bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial/Eks Psikotik/ Eks Penyandang Disabilitas Mental yang memerlukan pengobatan.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan eks psikotik di Kabupaten Sintang adalah :

a. Kurangnya dukungan keluarga klien dalam pengobatan Penyandang Masalah Penyakit Psikotik (gangguan kesehatan jiwa)

b. Minimnya data yang berkaitan dengan masalah sosial khususnya PMKS

c. Keterbatasan anggaran dalam melayani PMKS sehingga masih banyak yang belum terlayani.

Upaya dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan pelayanan eks psikotik adalah :

a. Perlu dilakukan penyuluhan, motivasi terhadap keluarga agar mau menerima dan ikut berpartisipasi dalam penanganan Penyandang Masalah Penyakit Psikotik (gangguan kesehatan jiwa)

b. Perlu dilakukan pemutakhiran data dan pembinaan tentang PMKS

c. Membuat usulan anggaran pelayanan PMKS.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan PMKS di Kabupaten Sintang maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Sebaiknya alokasi dana secara proporsional dengan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sintang.

b. Perlu adanya penanganan khusus bagi penderita gangguan jiwa yang dinyatakan sembuh sebelum kembali ke keluarga, seperti terapi dan psikologi agar benar-benar siap kembali kepada lingkungannya.

c. Perlu adanya sosialisasi terhadap keluarga atau masyarakat untuk menghadapi penderita gangguan jiwa.

d. Diharapkan sistem penangangan penyakit psikotik yang sudah ditangani RSJ sampai sembuh dilanjutkan ke tingkat perawatan yang lebih intensif seperti ke Panti Sosial Bina Laras agar menjadikan mantan penderita memiliki keterampilan dan siap terjun ke masyarakat.

5. Pendataan Rumah Tangga Miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun Anggaran 2015

Pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan dengan baik memerlukan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai langkah tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang tahun sebelumnya telah melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Fakir Miskin, sehingga pada tahun ini dilaksanakan Pendataan Rumah Tangga Miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pendataan lanjutan ini dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Sintang, yaitu Kecamatan Ketungau Hulu, Serawai, Ketungau Tengah, Kayan Hulu dan Ambalau. Kemudian petugas pendataan adalah TKSK di masing-masing kecamatan tersebut dengan total 19 petugas.

Berikut hasil verivikasi dan validasi data Fakir Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2014 :

Tabel 2.24

Data Hasil Verivikasi dan Validasi Fakir Miskin Tahun 2015

KECAMATAN	FAKIR MISKIN
Serawai	15.365
Ambalau	10.153
Kayan Hulu	94
Sepauk	13.611
Tempunak	85
Sei Tebelian	3.834
Sintang	4.036
Dedai	12.213
Kayan Hilir	173
Kelam Permai	10.032
Binjai Hulu	4.126
Ketungau Hilir	8.875
Ketungau Tengah	15.139
Ketungau Hulu	22
JUMLAH	**97.758**

Data tersebut merupakan hasil penambahan data fakir miskin tahun sebelumnya dengan hasil pendataan pada tahun 2015 ini.

6. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma

Penyandang Cacat (Disabilitas) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas Fisik merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Namun karena kondisi kecacatannya sehingga terjadi ketidak berfungsian sosial secara wajar. Untuk mewujudkan suatu kesetaraan dengan masyarakat umumnya maka diperlukan pembinaan terhadap penyandang cacat agar menumbuhkan rasa percaya diri para penyandang cacat dan menciptakan keadaan yang memberikan peluang untuk mendapatkan kesempatan yang proporsional dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta dan masyarakat pada umumnya.

Upaya Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam rangka pembinaan penyandang cacat adalah melalui kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma** yang pada tahun 2015 ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pelatihan praktek pembuatan kue dan taplak meja yang diikuti oleh **60 orang** penyandang cacat di Kabupaten Sintang.

b. Menghadiri acara Wisuda Penerima Manfaat di BBRSBD Prof.Dr.Soeharso di Surakarta yaitu **2 orang** penyandang cacat asal Kabupaten Sintang.

c. Kegiatan kunjungan kerja ke Panti Rehabilitasi Vokasionalisasi Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong Bogor.

d. Kegiatan menghadiri hari ulang tahun Disabilitas di Aula RRI Pontianak dan sekaligus mendampingi **12 orang** penyandang disabilitas asal Kabupaten Sintang.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah :

a. Mengembangkan keterampilan yang ada pada diri penyandang cacat (disabilitas) untuk mengaplikasikan kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang dimiliki.

b. Memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan serta memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada agar dapat

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial, dan beradaptasi dengan lingkungan serta memiliki rasa percaya diri dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Bimbingan dan Pembinaan Kewirausahaan Penyandang Cacat (Disabilitas)

Keterbatasan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas bukan dan tidak boleh dipersamakan sebagai orang sakit atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum kecuali terdapat hal yang membuktikan sebaliknya. Dengan adanya UU tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas merupakan harapan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, akan tetapi penerapnnya masih jauh dari harapan. Sebagai contoh kuota 1% Penyandang Disabilitas di perusahaan atau lembaga Pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana diamanatkan dalam UU.

Salah satu hak Penyandang Disabilitas dalam UU adalah adanya kewajiban memberikan perhatian dan bimbingan serta dukungan agar kualitas hidup para Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi secara mandiri. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan kewirausahaan bagi ***50 orang Penyandang Disabilitas Fisik*** dan penyerahan barang berupa bantuan kursi roda, tongkat dan alat bantu dengar.

8. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi korban bencana.

Dalam penanggulangan bencana itu sendiri dilakukan secara profesional, interderpemental, intersektoral, intergenarsional dan *futuristic* karena bencana datanya sangat sulit diprediksi secara tepat dan melibatkan beberapa elemen Pemerintahan dan masyarakat, misalnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang merupakan salah satu unsur masyarakat yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang untuk membantu dalam usaha-usaha penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam dan bencana sosial lainnya.

Seksi Urusan Korban Bencana dalam kegiatannya melaksanakan monitoring daerah-daerah rawan bencana, memberikan bantuan bencana berupa beras, permakanan, sandang dan alat masak guna meringankan penderitaan korban bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam penanganan bencana TA 2015, adalah :

a. Sosialisasi kampung siaga bencana di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dedai dan Ketungau Hilir dengan jumlah peserta masing-masing 50 orang.

b. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana sosial , yaitu ***korban bencana kebakaran 88 KK*** di 4 Kecamatan, yaitu Sepauk, Sei Tebelian, Sintang dan Kayan Hilir

c. Pembinaan kepada TAGANA untuk membantu dalam penanganan bencana yaitu kepada **32 orang TAGANA**.

d. Monitoring daerah rawan bencana.

Salah satu kegiatan penanggulangan bencana adalah Sosialisasi Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan atau Komunitas Adat sederajat terutama di daerah rawan bencana. Adapun tujuan dilaksanakan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana adalah :

1. Memberikan pengetahuan tengang penanggulangan bencana, kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat apabila terjadinya bencana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengahadapi bencana.

9. Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program/subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Dengan PKH diharapkan peserta PKH (selanjutnya disebut sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Sintang baru difokuskan kepada 8 (delapan) Kecamatan yaitu Sepauk, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Hal ini dikarenakan kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI sangat terbatas, dengan pertimbangan 8 (delapan) Kecamatan yang mendapatkan PKH merupakan daerah yang mempunyai angka kemiskinan tinggi.

Pada tahun 2015, Dinas Sosial Kabupaten Sintang melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Program PKH. Sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat 3.456 Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima

PKH. Kemudian berdasarkan koordinasi ke Kementerian Sosial RI pada bulan Juni 2015 adanya penambahan KSM di 6 lokasi Kecamatan : Sintang, Dedai, Kelam Permai, Tempunak, Sungai Tebelian dan Binjai.

10. Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Dengan PKH diharapkan peserta PKH (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM)) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu : Kesehatan, Pendidikan, Pangan dan Gizi termasuk menghilangkan kesengajaan melekat pada diri masyarakat miskin.

Adapun maksud dilaksanakannya Sosialisasi PKH adalah agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa PKH sangat berbeda dengan program Pemerintah yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain bahwa PKH adalah sebuah program Pemerintah yang bersyarat yakni pemberian bantuan tunai bersyarat kepada RTSM/KSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Sosialisasi PKH dilaksanakan di 4 Kecamatan, yaitu Tempunak, Tebelian, Kelam Permai dan Dedai.

11. Monitoring/Pembinaan Kelompok Usaha Bersama KUBE bagi Keluarga Miskin

Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Bentuk

kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan untuk kelompok usaha seperti ternak sapi, babi, ayam dank kolam ikan.

KUBE pada tahun ini dilaksanakan di 5 Kecamatan sebanyak 300 orang dengan jenis KUBE ternak.

Bantuan ternak yang diberikan cuma-cuma, namun jika berhasil dalam pengelolaan bantuan dan berkembang biak maka dapat dibuatkan kelompok usaha bersama yang baru (penambahan kube).

Adapaun desa-desa yang mendapat bantuan KUBE adalah desa yang masih dikategorikan Desa Tertinggal dan lokasinya sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Sintang sehingga dalam melaksanakan monitoring/pembinaan memerlukan dana yang cukup besar ini dikarenakan letak geografis yang sangat sulit.

Materi kegiatan monitoring/pembinaan KUBE adalah berupa penyuluhan, Tanya jawab dan peninjauan langsung ke tempat lokasi ternak. Adapaun hasil monitoring yang didapat di lapangan adalah KUBE bagi keluarga miskin masih tetap eksis dalam mengelola ternak dan adanya peningkatan taraf hidup bagi KUBE setelah mengelola ternak.

12. Sosialisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan

Salah satu masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sintang adalah kemiskinan, baik kemiskinan di desa maupun di perkotaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten Sintang dalam mengentaskan kemiskinan seperti Bantuan dan Perlindungan Sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, Pemberdayaan Masyarakat Mikro dan Kecil (KUR). Dan pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sintang mengentaskan kemiskinan melalui KUBE Fakir Miskin.

Sosialisasi KUBE Penerima Bantuan dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan, dengan tujuan sebagai berikut :

a. Memberikan ilmu pengetahuan kepada fakir miskin agar mereka dapat mengelola ternak dengan baik
b. Memberikan stimulan dalam rangka pengembangan usaha ternak
c. Hasil dari pelatihan ketrampilan manajemen KUBE fakir miskin sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang akan dating.

Adapun jenis KUBE yang dilaksanakan adalah ternak sapi, babi, ayam dan ikan.

13. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

Peran masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara yuridis formal, kedudukan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat kuat. Salah satu fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang ada di Kabupaten Sintang.

Pembinaan dimaksud agar TKSM menguasai keterampilan dan ilmu pekerjaan sosial. Dengan harapan TKSM dapat berkiprah dan terandalkan sehingga tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial tercapai secara efektif dan efisien. Disamping itu kegiatan ini secara luar diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial.

Kegiatan peningkatan kualitas SDM TKSM TA 2015 dilaksanakan di Kecamatan Sepauk selama 2 (dua) hari dengan peserta yang terdiri dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Desa-desa melalui

Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), aparat desa non PNS / dari unsur masyarakt peduli sosial sejumlah 30 orang.

14. Pemetaan Sosial Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Segulang Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Program Pemberdayaan KAT sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan. Atas kebijakan tersebut maka hendaknya KAT mendapat perhatian yang proporsional dalam pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing daerah. Oleh karena itu pada tahun 2015, Dinas Sosial Kabupaten Sintang melaksanakan pemetaan sosial lokasi KAT di Desa Segulang Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Desa Segulang terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Tomakung Rabing, Dusun Korong Penabun, Dusun Sepakon, Dusun Sokone dan Dusun Sepunduk Lotang.

Hasil Pemetaan Sosial menunjukkan sebagai berikut :

a. Bahwa kehidupan warga Desa sudah menetap, artinya mereka tidak lagi melakukan perpindahan. Hal ini dikarenakan lokasi yang mereka tempati saat ini sangat mendukung baik dari segi kemudahan mencari nafkah, ketenangan termasuk keamanan tehadap bencana alam.

b. Interaksi sosial warga sudah agak tinggi, yang artinya komunikasi maupun pertemuan warga Desa maupun Dusun sudah sangat sering, tingginya interaksi sosial warga Dusun ini dengan orang lain karena didukung prasarana transportasi (sungai) serta sarana transportasi (motor air, speed) yang dimiliki warga.

c. Homogenitas suku yaitu seluruh warga Dusun bersuku Dayak U'ut Danum atau Sub Suku Dayak U'ut Danum dengan menganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Pola perkawinan menurut ajaran agama dan adat setempat dengan sesama suku, sangat jarang terjadi

perkawinan campur dengan perbedaan suku, agama ataupun masyarakat pendatang.

d. Peralatan yang digunakan dalam berladang dan berkebun karet masih sangat sederhana, seperti parang panjang, kampak, parang pendek dan cangkul diperoleh dengan membeli dipasar.

e. Desa Segulang terdiri dari 50 KK (176 jiwa) yang sebagian besar sebagai petani.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Desa Segulang tidak masuk kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT).

15. Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan ke-69

Memperingati dan mengenang kembali jasa-jasa para Pahlawan merupakan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Karena sebagai perwujudan mensyukuri nikmat dari hasil perjuangan para Pahlawan. Bentuk kegiatan mengenang jasa-jasa Pahlawan antara lain upacara bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mengunjungi museum-museum Tentara Nasional Indonesia.

Kegiatan peringatan hari Pahlawan dilaksanakan setiap tanggal 10 November, dimana pada tahun 2015 ini memperingati 70 tahun perjuangan para Pahlawan dengan tema “ Semangat Kepahlawanan adalah Jiwa Ragaku”.

Di Kabupaten Sintang peringatan hari Pahlawan dilaksanakan melalui upacara di Lapangan Upacara Kodim 1205 Sintang pada pukul 08:00 WIB sampai selesai. Adapun para peserta Upacara adalah jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, Instansi vertikal maupun swasta dan sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang.

Diharapkan dengan adanya peringatan hari Pahlawan dapat menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan dan kejuangan setiap orang untuk

kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara serta menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam upaya untuk mencapai agenda mewujudkan tenaga kerja produktif yang mampu mendukung perluasan lapangan kerja dan menciptakan hubugan industrial yang kondusif serta terjaminnya keberlangsungan usaha bagi pengusaha. Dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang meliputi :

a. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial.

   	Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan / keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.

Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak mampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin), tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (*culture poverty),* tidak ada kemauan/ pasrah/ patah semangat (*fatalistik)* dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan *a-sosial*, berperilaku *desktruktif* atau melakukan *tindak kriminal*.

b. Kecacatan

Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin diperberat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan.

c. Ketunaan Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Tingginya kebutuhan akan SDM yang profesional sangat diperlukan dimasa-masa kritis sekarang ini. Negara maju lainnya telah membuktikan bahwa kecanggihan pembangunan sektor industri dan ekonomi masih terus membutuhkan pembangunan sektor sosial, khususnya

pembangunan manusia sebagai pelaku dan penggerak pembangunan. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta penderita HIV/AIDS. Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan.

Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu dimana mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Mereka hidup menggelandang/ mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya dan tidak "*utuhnya*" pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

d. Keterpencilan dan Ketertinggalan

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan soal kemiskinan; dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, Lingkungan, Integrasi Sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

e. Akibat Bencana Alam

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam (banjir).

f. Akibat Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia *(man made disasters*) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh.

Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat di tanah air. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial.

Meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, baik jumlah maupun jenisnya, hal ini menjadi permasalahan yang serius dan perlu suatu penanganan secara terpadu, dikarenakan banyak hal yang muncul dari penyakit sosial seperti

orang terlantar dan tuna susila, Tidak adanya rumah singgah atau tempat sementara bagi para kelayan yang mengalami penyakit sosial untuk dapat melaksanakan pemulihan dan pembinaan yang sesuai dengan prosedur standar pelayanan minimal sebagai alat indikator keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial, Belum ada Panti Rehabilitasi Sosial bagi para Penyandang Cacat baik milik Pemerintah maupun swasta, sehingga sulit mencari tenaga yang memiliki kualifikasi khusus Pembimbing dan Pelatih Penyandang Cacat serta kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung penanganan penanggulangan bencana sehingga belum optimalnya bantuan terhadap masyarakat dan tenaga skill di bidang penanggulangan bencana belum ada terlatih.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021.***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan insfrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.

6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Visi 2 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Berkualitas				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	**Misi 3 : Melaksanakan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dan Didukung Infrastruktur.**	**belum optimalnya pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dan Didukung Infrastruktur.**		
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	belum tersedianya data dan informasi yang akurat dalam mendukung pelayanan bidang social,	Lemahnya dukungan data dan kapasitas SDM	Komitmen terhadap arti penting perkembangan teknologi data dan informasi
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur	Dukungan aturan dan anggaran
	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum sinergisnya program peningkatan disiplin aparatur dengan aturan yang berlaku	Kapasitas SDM	Dukungan aturan
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas SDM	Kebijakan pembangunan nasional dan dukungan aparatur
	- Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT, dan MKKS	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pemberdayaan fakir miskin dan MKKS	keterbatasan anggaran program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
	- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya koordinasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	keterbatasan anggaran program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran

Visi 2 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Berkualitas				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma	Belum optimalnya koordinasi pembinaan bagi para penyandang cacat dan trauma	keterbatasan anggaran program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
	- Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	Belum optimalnya koordinasi Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	keterbatasan anggaran program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
	- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kessos	Belum optimalnya koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kessos	keterbatasan anggaran program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran

3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sintang tersebut maka visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik".

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021 juga tidak terlepas dari keinginan kuat pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan "*Millenium Development Goals* (MDG's)" yang merupakan komitmen global para pemimpin dunia.

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021 tersebut, maka misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.
2. Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dansumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).
4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional.
6. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrative dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi kerja.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna menunjang kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, ketepatan dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.	Belum optimalnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna menunjang kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, ketepatan dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif yang terkoordinir, bersinergi dan komprehensif.	Lemahnya dukungan data dan kapasitas SDM, Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur	Komitmen terhadap arti penting perkembangan teknologi data dan informasi, Dukungan aturan dan anggaran
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan dan Pemberdayaan Bantuan Sosial kepada masyarakat secara efisien, efektif dan berkesinambungan.	belum maksimalnya Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan dan Pemberdayaan Bantuan Sosial kepada masyarakat secara efisien, efektif dan berkesinambungan.	Belum adanya koordinasi yang sinergis antara instansi terkait, keterbatasan anggaran program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
3.	Terwujudnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna memberikan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.	belum maksimalnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna memberikan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.	Belum adanya koordinasi yang sinergis antara instansi terkait, keterbatasan anggaran program, Kapasitas SDM	Dukungan aturan yang tersedia

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Sosial terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, untuk mewujudkan itu Dinas Sosial mempunyai factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Sintang

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Jenis Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang	Faktor Kebutuhan Pelayanan	
		Besaran Kebutuhan Pelayanan	Pendorong
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Rekomendasi dari Izin Pengumpulan dan Sumbangan Sosial	Banyaknya pelaku usaha mengadakan Undian Berhadiah	Dukungan aturan yang tersedia
2.	Rekomendasi Pelayanan Jamkesmas/PBI-JKN	Terbantunya pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu.	Dukungan aturan yang tersedia
3.	Pelayanan terhadap Penyandang Cacat	Terbantunya para Penyandang Cacat dengan memberikan pelatihan serta memberikan bantuan untuk usaha.	Dukungan aturan yang tersedia

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan, Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Bappenas RI dan Bappeda Propinsi Kalimantan Barat dan Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2010-2020, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai berikut:

a. Belum tertatanya manajemen pelaksanaan dan penganggaran berbasis kinerja bidang sosial;
b. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan dan pelayanan bidang sosial;
c. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan bidang sosial;
d. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik di pelayanan bidang sosial;
e. Masih terbatasnya fungsi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang sosial.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organsiasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil–hasil yang positif. Suatu visi harus menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka dirumuskan visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif Dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik".

Ada 3 (tiga) kata kunci dalam visi Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2017-2021, yaitu:

1) Terwujudnya masyarakat Kab. Sintang yang sejahtera, produktif dan mandiri dengan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif serta kelompok usaha bersama, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2) Terwujudnya masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Sintang.
3) Terwujudnya penerapan pelayanan pemerintahan yang baik adalah suatu komitmen yang kuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

7. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.
8. Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pemberdayaan sosial, pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).
10. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
12. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Secara sederhana keterkaitan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, produktif dan mandiri yang mampu meningkatkan taraf hidup berhubungan secara fungsional dengan *Misi 1*) yaitu Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.
2. Visi terwujudnya masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial berhubungan secara fungsional dengan , *Misi 2*) yaitu Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan, *Misi 3*) yaitu Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas), *Misi 4)* Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. *Visi Terwujudnya penerapan pelayanan yang baik berhubungan secara fungsional dengan Misi 5*) yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional, *Misi 6*) yaitu Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

KETERKAITAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

VISI | **MISI**

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, produktif dan mandiri yang mampu meningkatkan taraf hidup

→ Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial

→ Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.

→ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat.

→ Meningkatkan dan melestarikannilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Terwujudnya penerapan pelayanan pemerintahan yang baik

→ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional.

→ Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*
   - Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial.

   Tujuan

   - Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja;

2. *Misi Kedua*
   - Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat.

   Tujuan

   - Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial;
   - Meningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarnisasi dan legislasi pelayanan sosial;

3. *Misi Ketiga*
   - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas).

Tujuan

- Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

4. *Misi Keempat*
   - Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

   Tujuan

   - Terlestarikan, teranam dan teramalkannya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kejuangan;

5. *Misi Kelima*
   - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

   Tujuan

   - Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;

6. *Misi Keenam*
   - Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

   Tujuan

   - Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator

sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. *Tujuan Misi Pertama*

   Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja.

   Sasaran :

   - Tercapainya pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuan serta mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga dan lingkungannya.
   - Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial.

2. *Tujuan Misi Kedua*

   - Meningkatnya mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial.
   - Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial.

   Sasaran :

   - Pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
   - Kebijakan dalam penetapan standarisasi pelayanan sosial.

3. *Tujuan Misi Ketiga*

   Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

   Sasaran :

   - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial.

- Memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan organisasi sosial daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui wadah jaringan kerja

4. *Tujuan Misi Keempat*

   Terlestarikan, tertanam dan teramalkannya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kejuangan.

   Sasaran :

   - Meningkatkan kelestarian dan pengamalan nilai-nilai perjuangan.
   - Menumbuhkan semangat kegotongroyongan, kepedulian sosial di masyarakat.

5. *Tujuan Misi Kelima*

   Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional.

   Sasaran :

   - Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial.
   - Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional.

6. *Tujuan Misi Keenam*

   Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial ;

   Sasaran :

   - Tersusunnya prosedur pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial.
   - Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Dinas Sosial Kabupaten Sintang selama tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Pemberdayaan sosial yang mengandung makna adanya peningkatan pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.
2. Pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.
3. Kemitraan Sosial yang mengandung makna adanya optimalisasi kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
4. *Partisipasi Sosial*, yang mengandung makna adanya meningkatkan prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
5. *Advokasi Sosial*, yang mengandung makna adanya peningkatan upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.
6. Melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai kepahlawanan dan perjuangan.
7. Meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana tugas Dinas Sosial .
8. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung Dinas Sosial .
9. Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
10. Memfasilitasi dan meningkatkan layanan data dan informasi ketenagakerjaan ketransmigrasian serta sosialisasi kebijakan dalam meningkatkan efektifitas ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya.
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi atau keterpaduan, sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel.
4. Menciptakan iklim yang dapat mendorong, meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dengan mempertimbangankan keunikan nilai sosial budaya daerah yang beragam serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.
6. Menciptakan suatu kondisi kesetiakawanan dan kepedulian sosialyang tinggi.
7. Sementara itu dengan dilandasi kenyataan masih terbatasnya komitmen serta pemahaman tentang visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial pada berbagai jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara profesional dipandang perlu dilakukan advokasi dan

pendampingan sosial di dalam pengelolaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

8. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
9. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
10. Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	**:**	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Produktif Dan Mandiri Dengan Tingkat Kepedulian Sosial Yang Tinggi Didukung Penerapan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik.**	
Misi I	**:**	**Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan, motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial**	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jejaring kerja	- Mencakup sasaran perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya; - Mencakup sasaran perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.	- Pemberdayaan sosial yang mengandung makna adanya peningkatan pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionlisme dan kinerjanya; - Pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.	- Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya. - Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi atau keterpaduan, sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel
Misi II	**:**	**Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme dalam proses rehabilitasi sosial serta pelayanan masyarakat**	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan	- Pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat; - Kebijakan dalam penetapan standarisasi pelayanan sosial	- Kemitraan Sosial yang mengandung makna adanya optimalisasi kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra	- Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standarnisasi dan legislasi pelayanan sosial			- Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dengan mempertimbangankan keunikan nilai sosial budaya daerah yang beragam serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat
Misi III : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau partisipasi sosial masyarakat (parsosmas)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan organisasi sosial; - Memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan organisasi sosial daerah; - Meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui wadah jaringan kerja	- Partsipasi Sosial yang mengandung makna adanya meningkatkan prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya; - Advokasi Sosial yang mengandung makna adanya peningkatan upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali	- Menciptakan iklim yang dapat mendorong, meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; - advokasi dan pendampingan sosial di dalam pengelolaan program pembangunan kesejahteraan sosial
Misi IV : Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlestarikan, tertanam dan teramalkannya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kejuangan	- Meningkatkan kelestarian dan pengamalan nilai-nilai perjuangan. - Menumbuhkan semangat kegotongroyongan, kepedulian sosial di masyarakat.	Melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai kepahlawanan dan perjuangan	Menciptakan suatu kondisi kesetiakawan an dan kepedulian sosial yang tinggi
Misi V : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial - Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Sosial yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	- Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung Dinas Sosial - Meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana tugas Dinas Sosial	- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Sintang - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Misi VI : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial	- Tersusunnya prosedur baku pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial - Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial	- Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis	- Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sintang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021

Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya pelayanan administratis perkantoran**			562.863.420		719.149.762		791.064.738		870.171.212		957.188.333				
• Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya	• Terlaksananya Forum SKPD		20%	81.243.200	40%	89.367.520	60%	98.304.272	80%	108.134.699	100%	118.948.169			Sekretariat	
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		20%	3.237.000	40%	3.560.700	60%	3.916.770	80%	4.308.447	100%	4.739.292			Sekretariat	
• Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	• Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		20%	41.250.000	40%	45.375.000	60%	49.912.500	80%	54.903.750	100%	60.394.125			Sekretariat	
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	• Tersedianya jasa pemel. & perizinan kendaraan dinas / operasional		20%	4.200.000	40%	4.620.000	60%	5.082.000	80%	5.590.200	100%	6.149.220			Sekretariat	
• Penyediaan jasa kebersihan kantor	• Tersedianya jasa kebersihan kantor		20%	38.624.050	40%	42.486.455	60%	46.735.101	80%	51.408.611	100%	56.549.472			Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Penyediaan alat tulis kantor	• Tersedianya ATK		20%	27.138.125	40%	29.851.938	60%	32.837.131	80%	36.120.844	100%	39.732.929			Sekretariat	
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	• Tersedianya barang cetakan & penggandaan		20%	21.585.000	40%	23.743.500	60%	26.117.850	80%	28.729.635	100%	31.602.599			Sekretariat	
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	• Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		20%	10.166.000	40%	11.182.600	60%	12.300.860	80%	13.530.946	100%	14.884.041			Sekretariat	
• Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		20%	3.120.000	40%	3.432.000	60%	3.775.200	80%	4.152.720	100%	4.567.992			Sekretariat	
• Penyediaan Makanan dan Minuman	• Tersedianya makanan dan minuman		20%	12.600.000	40%	13.860.000	60%	15.246.000	80%	16.770.600	100%	18.447.660			Sekretariat	
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	• Terwujudnya pelaksanaan tugas keluar daerah		20%	71.090.000	40%	78.199.000	60%	86.018.900	80%	94.620.790	100%	104.082.869			Sekretariat	
• Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Terbantunya pelayanan administrasi perkantoran dan administrasi teknis lainnya		4 org	67.039.200	4 org	73.743.120	4 org	81.117.432	4 org	89.229.175	4 org	98.152.093			Sekretariat	
• Peringatan hari besar Nasional/ Hari Pahlawan	• Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran		20%	104.379.345	40%	114.817.280	60%	126.299.007	80%	138.928.908	100%	152.821.799			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Kegiatan Napak Tilas	• Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran				40%	100.000.000	60%	110.000.000	80%	121.000.000	100%	133.100.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Pameran pem-bangunan	• Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan		1 kl	26.071.500	1 kl	28.678.650	1 kl	31.546.515	1 kl	34.701.167	1 kl	38.171.283			Sekretariat	
• Rapat koordinasi dan Pembinaan ke Dalam daerah	• Jumlah Pembinaan ke dalam daerah		16 kl	39.170.000	30 kl	43.087.000	40 kl	47.395.700	60 kl	52.135.270	100 kl	57.348.797			Sekretariat	
• Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	• Jumlah BBM yang dibutuhkan		liter	11.950.000	liter	13.145.000	liter	14.459.500	liter	15.905.450	liter	17.495.995			Sekretariat	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			97.216.450		1.641.627.385		152.790.124		168.069.136		184.876.049				
• Pengadaan kendaraan dinas/ operasioanal	• Tersedinya kendaraan dinas/ operasioanal						60%	30.000.000	80%	33.000.000	100%	36.300.000			Sekretariat	
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor	• Tersedianya perlengkapan gedung kantor				40%	6.000.000	60%	6.600.000	80%	7.260.000	100%	7.986.000			Sekretariat	
• Pengadaan mebeleur	• Tersedianya Pengadaan mebeleur		20%	12.200.000	40%	13.420.000	60%	14.762.000	80%	16.238.200	100%	17.862.020			Sekretariat	
• Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	• Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		20%	11.135.000	40%	12.248.500	60%	13.473.350	80%	14.820.685	100%	16.302.754			Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas	• Terpeliharanya kendaraan dinas		20%	13.235.350	40%	14.558.885	60%	16.014.774	80%	17.616.251	100%	19.377.876			Sekretariat	
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	• Terpeliharanya peralatan gedung kantor		20%	6.000.000	40%	6.600.000	60%	7.260.000	80%	7.986.000	100%	8.784.600			Sekretariat	
• Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	• Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor				100%	30.000.000										
• Pembangunan gedung kantor	• Tersedianya gudang logistik				100%	1.500.000.000									Sekretariat	
• Pengadaan perangkat komputer dan printer	• Tersedianya perangkat komputer dan printer		20%	46.646.100	40%	50.000.000	60%	55.000.000	80%	60.500.000	100%	66.550.000			Sekretariat	
• Pemeliharaan Komputer dan Printer	• Meningkatnya kelancaran tugas tugas administrasi Perkantoran		20%	8.000.000	40%	8.800.000	60%	9.680.000	80%	10.648.000	100%	11.712.800			Sekretariat	
• Pembangunan Pagar Kantor	• Tersedianya Pagar Kantor yang dapat menunjang kelancaran tugas															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tersedianya kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur**			0		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000				
• Pengadaan Atribut dan perlengkapan Seragam Dinas	• Tersedianya atribut dan perlengkapan seragam dinas				40%	25.000.000	60%	27.500.000	80%	30.250.000	100%	33.275.000			Sekretariat	
• Pengadaan pakaian kantor khusus untuk hari-hari tertentu	• Tersedianya pakaian kantor khusus untuk hari-hari tertentu				40%	25.000.000	60%	27.500.000	80%	30.250.000	100%	33.275.000			Sekretariat	
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Tersedianya kapasitas sumber daya aparatur**			119.185.000		131.103.500		144.213.850		158.635.235		174.498.759				
• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	• Terlaksanaya pendidikan dan pelatihan formalmelalui kegiatan bimbingan teknis		20%	119.185.000	40%	131.103.500	60%	144.213.850	80%	158.635.235	100%	174.498.759			Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	**Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**			11.994.000		19.400.000		21.340.000		23.474.000		25.821.400				
• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	• Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 dok	1.999.000	12 dok	2.000.000	12 dok	2.200.000	12 dok	2.420.000	12 dok	2.662.000			Sekretariat	
• Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran	• Tersusunnya Laporan semesteran realisasi anggaran				2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.200.000	2 Dok	2.420.000	2 Dok	2.662.000			Sekretariat	
• Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	• Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi anggaran		1 Dok	1.999.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.420.000	1 Dok	2.662.000			Sekretariat	
• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	• Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dok	1.999.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.420.000	1 Dok	2.662.000			Sekretariat	
• Penyusunan LAKIP	• Tersusunnya Laporan LAKIP		1 Dok	1.999.000	1 Dok	1.900.000	1 Dok	2.090.000	1 Dok	2.299.000	1 Dok	2.528.900			Sekretariat	
• Penyusunan LKPJ	• Tersusunnya Laporan LKPJ				1 Dok	1.900.000	1 Dok	2.090.000	1 Dok	2.299.000	1 Dok	2.528.900			Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor	• Tersusunnya Laporan Barang dan Inventaris Kantor		1 Dok	1.999.000	1 Dok	1.900.000	1 Dok	2.090.000	1 Dok	2.299.000	1 Dok	2.528.900			Sekretariat	
• Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah	• Tersusunnya Laporan Penataan Aset Pemerintah		1 Dok	1.999.000	1 Dok	1.900.000	1 Dok	2.090.000	1 Dok	2.299.000	1 Dok	2.528.900			Sekretariat	
• Penyusunan Renstra	• Tersusunnya Renstra SKPD														Sekretariat	
• Penyusunan Laporan Uraian Jabatan	• Tersusunnya Laporan Uraian Jabatan				1 Dok	1.900.000	1 Dok	2.090.000	1 Dok	2.299.000	1 Dok	2.528.900			Sekretariat	
• Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	• Tersusunnya penyusunan laporan analisis beban kerja				1 Dok	1.900.000	1 Dok	2.090.000	1 Dok	2.299.000	1 Dok	2.528.900			Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	**Tersusunnya Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya**			774.494.000		440.000.000		846.500.000		931.150.000		1.024.265.000				
• Pembinaan/ Monitoring Kelompok Usaha Bersama Bagi Keluarga Miskin	• Terlaksananya pembinaan/monitoring KUBE bagi Keluarga Miskin		20%	93.000.000			60%	50.000.000	80%	55.000.000	100%	60.500.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Bantuan Bahan Rumah / BBR	• Rumah tidak layak huni		20%	400.000.000	40%	125.000.000	60%	400.000.000	80%	440.000.000	100%	484.000.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa		20%	125.000.000	40%	125.000.000	60%	137.500.000	80%	151.250.000	100%	166.375.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Pembinaan/ Monitoring Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif	• Meningkatnya perekonomian Kelompok Usaha Bersama		20%	41.794.000	40%	50.000.000	60%	55.000.000	80%	60.500.000	100%	66.550.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Hari Kesetia kawanan Sosial Nasional (HKSN)	Meningkatnya motivasi kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat perdesaan dan perkotaan				20%	50.000.000	40%	55.000.000	80%	60.500.000	100%	66.550.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Pembinaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	Keluarga Sejahtera				20%	40.000.000	40%	44.000.000	80%	48.400.000	100%	53.240.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Pembinaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya pembinaan program PKH dan Bantuan PKH		20%	114.700.000	40%	50.000.000	60%	55.000.000	80%	60.500.000	100%	66.550.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Sosialisasi Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Harapan						60%	50.000.000	80%	55.000.000	100%	60.500.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Program Bimbingan, Motivasi dan Konsolidasi				62.792.900		69.072.190		75.979.409		83.577.350		91.935.085				
• Bimbingan dan motivasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK			20%	62.792.900	40%	69.072.190	60%	75.979.409	80%	83.577.350	100%	91.935.085			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				280.204.950		314.554.670		565.010.137		760.511.151		764.562.266				
• Penanganan Masalah-Masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat daru-rat dan kejadian luar biasa	Tertangani nya Penanganan Masalah - Masalah Tanggap darurat dan kejadian luar biasa		20%	135.155.250	40%	50.000.000	60%	100.000.000	80%	110.000.000	100%	121.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Kegiatan Pengadaan Posko Tagana	• Tersedianya wadah/tempat informasi bila terjadi bencana.						60%	50.000.000							Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	• Terciptanya kesiapan dalam mengahdapi bencana di lingkungan Masyarakat.						60%	50.000.000	80%	110.000.000	100%	120.000.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Pembentukan Kampung Siaga Bencana	• terwujudnya kampung yang siap siaga dalam menghadapi bencana.						60%	50.000.000	80%	140.000.000	100%	155.000.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Pengadaan Perlengkapan Anggota TAGANA	• tersedianya perlengkapan anggota TAGANA						60%	60.000.000	80%	60.000.000	100%	60.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Lanting TAGANA	• tersedianya Sarana dan Prasarana Lanting TAGANA						60%	30.000.000	80%	33.000.000	100%	36.300.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	• Terlidunginya masyarakat dari ancaman bencana				50%	60.000.000			100%	60.000.000					Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Penanganan bagi penghuni rumah singgah loka bina karya (LBK) dan Penanganan lanjut usia	• Meningkatnya Pelayanan Rehabiltasi dan Kesejahteraan Sosial				20%	45.000.000	40%	49.500.000	80%	54.450.000	100%	59.895.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan lanjut usia terlantar	• Meningkatnya Pelayanan Rehabiltasi dan Kesejahteraan Sosial		20%	76.196.000	40%	83.815.600	40%	92.197.160	80%	101.416.876	100%	111.558.564			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Penanganan gangguan jiwa terlantar	• Meningkatnya Pelayanan Rehabiltasi dan Kesejahteraan Sosial		20%	68.853.700	40%	75.739.070	40%	83.312.977	80%	91.644.275	100%	100.808.702			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembinaan Penyandang Disabilitas				90.600.100		180.000.000		283.000.000		296.300.000		309.930.000				
• Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Kewirausahaan Disabilitas	• Jumlah pembinaan penyandang disabilitas fisik				40%	75.000.000	60%	90.000.000	80%	100.000.000	100%	100.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Pemutahiran Data Penyan-dang cacat (disabilitas) dan Trauma	• Meningkatnya Pembinaan Para Penyandang Disabiltas				40%	30.000.000	60%	33.000.000	80%	36.300.000	100%	39.930.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Memfasilitasi Kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI)	• Terlaksananya kegiatan hari Disabilitas Internasional di kab Sintang						60%	75.000.000	80%	75.000.000	100%	75.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Kegiatan Pengiriman Penyandang Disabilitas KeBalai/ Pusat Rehabilitasi Disabilitas	• Meningkatnya Ketrampilan bagi penyandang Disabilitas		20%	90.600.100	40%	75.000.000	60%	85.000.000	80%	85.000.000	100%	95.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN				73.946.400		50.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000				
• Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN Bagi Fakir Miskin dan Orang Terlantar	• Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN		20%	73.946.400	40%	50.000.000	60%	95.000.000	80%	95.000.000	100%	95.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Program Pembinaan Anak Terlantar				0		0		60.000.000		66.000.000		72.600.000				
• Pembangunan Rumah Singgah	• tertampungnya sementara hasil razia penyandang PMKS						60%	60.000.000	80%	66.000.000	100%	72.600.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial				200.247.500		148.000.000		265.000.000		311.500.000		333.650.000				
• Pembinaan Penyandang Eks Gangguan Psikotik	Meningkatnya kesejah-teraan bagi penyandang eks psikotik		20%	200.247.500	40%	98.000.000	60%	100.000.000	80%	100.000.000	100%	100.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Kegiatan Bimbingan sosial bagi keluarga dan lingkungan pada Penyandang eks psikotik	• Terlaksanan ya bimbi-ngan sosial bagi keluar-ga pada penyandang eks psikotik				40%	50.000.000	60%	50.000.000	80%	80.000.000	100%	85.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Bimbingan Managemen Panti							60%	50.000.000	80%	60.000.000	100%	70.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
• Bimbingan terhadap Panti Sosial Anak							60%	65.000.000	80%	71.500.000	100%	78.650.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Pemberda-yaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				0		170.000.000		472.000.000		538.700.000		592.570.000				
• Pendataan dan monitoring Managemen Orsos/ Yayasan	Terlaksananya pendataan dan monitoring managemen orsos/ yayaysan						40%	50.000.000	60%	60.000.000	100%	66.000.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Sosialisasi Penertiban Undian Berhadaiah Gratis (UGB) dan Pengumpul Uang dan barang	Terlaksana nya Sosialisasi Penertiban UGB dan Pengumpulan uang dan barang						40%	80.000.000	60%	100.000.000	100%	110.000.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Pembinaan Karang Taruna	Aktifnya organisasi karang Taruna						60%	75.000.000	60%	85.000.000	100%	93.500.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Bagi Pengurus Karang Taruna	Terlaksananya Pemberda-yaan Kelem-bagaan Kese-jahteraan Sosial						60%	30.000.000	60%	33.000.000	100%	36.300.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Monitoring/ Pendataan Karang Taruna	Pendataan Organisasi Karang taruna di 14 Kecamatan						60%	50.000.000	60%	55.000.000	100%	60.500.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Pemetaan Sosial Lokasi KAT	Tersusunnya Dokumen KAT					45.000.000	60%	49.500.000	60%	54.450.000	100%	59.895.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
• Penjajakan Awal Studi Kelayakan dan semiloka Calon KAT	Tersedianya Data KAT dan Calon Lokasi KAT					50.000.000	60%	55.000.000	60%	60.500.000	100%	66.550.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
• Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan untuk Peningkatan SDM bagi Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan PSM dan TKSK				40%	75.000.000	60%	82.500.000	60%	90.750.000	100%	99.825.000			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	
Program Penanggu-langan Bencana				0				100.000.000		110.000.000		121.000.000				
• Pengadaan Lanting TAGANA	• Terlaksana-nya Penang-gulangan bencana						60%	100.000.000	80%	110.000.000	100%	121.000.000			Bidang Rehsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				3.984.226.020		7.146.665.252		7.062.731.777		8.077.004.955		8.671.705.450				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
	- Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	70 %	72 %	73 %	76 %	78 %	80 %	81 %
2	Program Pembinaan Para Paca dan Trauma							
	- Jumlah Pembinaan dan angka Paca dan Trauma	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	78 5	80 %
3	Program Penanggulangan korban bencana							
	- Tingkat upaya – upaya dalam penanggulangan bencana	70 %	73 %	75 %	77 %	78 %	79 %	82 %
4	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial							
	- Tingkat Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	63 %	64 %	68 %	74 %	78 %	80 %	81 %
5	Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT, dan PMKS							
	- Angka dan persentase fakir miskin, KAT, dan PMKS	65 %	62 %	60 %	58 %	56%	53 %	50 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Program Keluarga Harapan							
	- Tingkat pelaksanaan keluarga harapan	65 %	67 %	69 %	70 %	72 %	74 %	75 %
7	Program Bimbingan dan Latihan Manajemen							
	- Jumlah Bimbingan dan Latihan Manajemen	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %
8	Program Pemberdayaan kelembagaan Kessos							
	- Angka dan jumlah Kelembagaan Kessos	70 %	71 %	71,5 %	72 %	73 %	73,5 %	74 %
9	Program Bimbingan, Motivasi dan Konsolidasi							
	- Tingkat Bimbingan, Motivasi dan Konsolidasi guna tumbuhnya kesadaran semangat berorganisasi dikalangan generasi muda	67 %	68 %	70,5 %	72 %	72,5 %	73 %	73,5 %
10	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
	- Tingkat ketepatan dan kecepatan pelayanan	70 %	72 %	74 %	75 %	78 %	82 %	84 %
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	- Tingkat ketepatan dan kecepatan pelayanan	70 %	71 %	72 %	75 %	76 %	80 %	82 %
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	- Tingkat ketepatan dan kecepatan pelayanan	70 %	72 %	73 %	75 %	77 %	79 %	81,5 %
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	- Tingkat ketepatan dan kecepatan pelayanan	70 %	72 %	74 %	75 %	78 %	81 %	84 %

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi pendorong bagi terwujudnya Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh Aparatur Sipil Nasional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang, serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

ALFONSIUS SUDIN,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590201 197912 1 011